

Analisis Hak Atas Perlindungan Serta Pengawasan Terhadap Data Pribadi Pada Proses Penegakkan Hukum

Faturahman¹, Ratu Suci Nurrachmah², Ridwan Mohammad³

arturcikaseban@gmail.com¹, ratusuci75@gmail.com², ridwanmuhammadrizki385@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRACT

Protection of personal data is an embodiment of a guarantee of human rights, privacy and inviolability. The state has a full obligation to respect each other and respect the rights of every human being, as regulated in statutory regulations. Regulations regarding the protection of personal data owned by every human being, there is confusion and overlap due to the many regulations that have been established. The government, together with related officials, has formulated a draft law regarding the protection and supervision of the personal rights of every human being. This protection and supervision aims to cover the exception of personal data on the basis of a legitimate public interest, including law enforcement purposes. Arrangements that are carried out in a balance between the interests of law enforcement of a crime and the protection and supervision of the personal data of every human being, are expected to avoid actions that are carried out arbitrarily.

Keywords: Protection, supervision, personal data, law

ABSTRAK

Pelindungan terhadap data pribadi merupakan suatu perwujudan dari suatu jaminan terhadap hak-hak pada manusia, secara privasi dan tidak bisa diganggu gugat. Negara yang memiliki kewajiban penuh, untuk saling menghargai serta menghormati akan hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang sebagaimana sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai suatu perlindungan akan sebuah data pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia, ini terdapat kebinungan dan tumbang tindih akibat banyaknya suatu peraturan yang sudah ditetapkan. Pemerintah bersama aparat-aparat yang terkait, merumuskan suatu rancangan perundang-undangan tentang perlindungan serta pengawasan akan hak pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia. Adanya perlindungan serta pengawasan ini memiliki tujuan guna mencakup suatu pengecualian dari sebuah data pribadi dengan asas suatu kepentingan umum yang sah, termasuk untuk suatu kepentingan penegakkan hukum. Pengaturan yang dilakukan secara seimbang antara suatu kepentingan penegakkan hukum suatu pidana dengan suatu perlindungan serta pengawasan pada data pribadi setiap manusia, diharapkan untuk dapat terhindar dari suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenangnya.

Kata kunci : Perlindungan, pengawasan, data pribadi, hukum

PENDAHULUAN

Hak atas suatu perlindungan serta pengawasan pada suatu data pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia, ini sangat penting di zaman sekarang, terutama dalam konteks penegakkan suatu hukum. Data pribadi merupakan suatu informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu individu, sehingga adanya suatu perlindungan serta pengawasan terhadap data tersebut. Di Indonesia, perlindungan serta pengawasan terhadap data diri ini sudah diatur di dalam regulasi serta perundang-undangan.

Regulasi ini dapat mengatur tentang bagaimana suatu data harus di kumpulkan, dan di simpan dengan sebaik mungkin oleh setiap individu. Perundangan ini dapat memberikan suatu hak terhadap setiap individu untuk mengontrol serta mengendalikan hak-hak yang

dimiliki oleh setiap manusia, khususnya suatu data pribadi yang dimilikinya. Dalam proses penegakkan hukum, data pribadi ini sangat diperlukan, guna menyelidiki suatu criminal. Namun, penggunaan dari data pribadi ini memiliki suatu tantangan, ialah :

1. Adanya suatu keseimbangan antara suatu keamanan dan juga privasi yang telah dilakukan oleh setiap individu, suatu penegakkan hukum ini perlu mengakses suatu data pribadi yang bertujuan guna menjaga suatu keamanan public dan juga menyelesaikan suatu kasus tentang data pribadi.
2. Adanya potensi penyalahgunaan suatu data, yang dimana pastinya memiliki sebuah risiko bahwa data pribadi yang telah di kumpulkan akan mengalami kesalahan, baik itu oleh aparat yang terkait, ataupun adanya pihak ketiga yang ikut berkontribusi.
3. Kepatuhan terhadap regulasi, ialah suatu aparat penegakkan hukum ini harus mematuhi sebuah regulasi yang ketat mengenai suatu pengumpulan dan juga penggunaan sebuah data pribadi yang bisa membatasi suatu efektivitas untuk menyelidiki, dan jika tidak diikuti dengan benar.

Alinea ke-4 Pembukaan pada perundang-undangan yang menyatakan bahwa suatu pemerintah Indonesia ini mempunyai suatu kewajiban konstitusional yang dapat melindungi serta mengawasi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan juga melaksanakan suatu ketertiban dunia. Perlindungan data pribadi merupakan suatu isu yang sangat mendesak di era digital saat ini.

Perlindungan data pribadi merupakan suatu bagian dari integral pada suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia, khususnya hak privasi yang telah diakui. Setiap individu memiliki hak guna mengontrol suatu informasi pribadi yang dimiliki dan juga guna mengetahui tentang bagaimana data tersebut dapat digunakan. Suatu data yang tidak dapat dilindungi ini rentan sekali mengalami suatu ancaman kejahatan, seperti adanya penculikan akan identitas serta adanya penipuan. Oleh karena itu, peran perlindungan serta pengawasan ini merupakan suatu langkah yang penting guna menyalahgunakan suatu informasi pribadi.

Kepercayaan masyarakat akan pemerintah, serta lembaga yang terkait ini sangat berpengaruh oleh bagaimana cara mereka dapat menangani suatu data tersebut. Pelanggaran data ini dapat merusak suatu reputasi serta dapat mengurangi kepercayaan akan publik. Kebijakan perlindungan serta pengawasan yang ketat ini dapat membantu guna menjaga suatu kepercayaan dengan memastikan bahwa suatu data dapat dilindungi serta diawasi dengan sebaik mungkin. Banyak sekali negara yang telah menerapkan regulasi yang ketat terkait perlindungan serta pengawasan akan data-data pribadi yang dimilikinya.

Kepatuhan terhadap suatu regulasi ini, bukan hanya kewajiban hukum saja akan tetapi juga suatu langkah yang sangat penting guna menghindari sanksi serta tuntutan hukum yang dapat merugikan setiap manusia. Perlindungan data data dapat memastikan bahwa penggunaan data pribadi ini dapat dilakukan secara adil dan transparan Perlindungan data pribadi yang efektif ini dapat mendukung suatu inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

Ketika individu merasa data mereka aman, mereka lebih cenderung ikut berpartisipasi dalam ekonomi digital, memberikan data mereka untuk layanan yang lebih personal dan berkualitas tinggi. Ini pada gilirannya mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan menerapkan suatu kebijakan tentang perlindungan data yang ketat, organisasi dapat mengurangi risiko terkait kebocoran data dan serangan siber. Protokol keamanan yang efektif membantu melindungi data pribadi dari akses tidak sah dan penyalahgunaan, sehingga meminimalkan potensi kerugian finansial dan reputasi yang diakibatkan oleh pelanggaran data

Tidak adanya suatu regulasi yang secara khusus dapat mengatur tentang suatu perlindungan serta pengawasan tentang data pribadi ini menjadi masalah di saat ini, adanya suatu tantangan tentang kemajuan akan sebuah teknologi ini mengancam suatu hak atas privasi guna masyarakat yang ada di Indonesia. Merespon adanya ketiadaan regulasi ini, suatu pemerintah bersama lembaga yang terkait ini telah melakukan suatu proses perumusan yang ada di perundang-undangan.

Dalam hal ini, dapat mencakup mengenai suatu pengecualian data pribadi yang tersebar di sejumlah bagian, yang dimana pengecualian ini dapat dilakukan dengan asas kepentingan umum atau kepentingan yang sah,

sehingga pemrosesan data pribadi mungkin untuk dilakukan.² Salah satu kepentingan umum dan kepentingan yang sah tersebut adalah kepentingan penegakan hukum pidana.

Rumusan Masalah

1. Apa saja risiko yang di dapat dari suatu pelanggaran data pribadi yang dapat memungkinkan terjadi dalam proses penegakan hukum dan bagaimana mitigasi risiko tersebut dilakukan?
2. Bagaimana kepatuhan terhadap perundang-undnagan dalam menerapkan suatu proses penegakkan hukum?

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis deskriptif, ialah lebih berfokus kepada penjelasan mengenai suatu fenomena hukum yang terjadi di suatu masyarakat yang dikaitkan dengan suatu norma-norma yang kaidah yang terkait. Tujuan dari adanya metode ini ialah guna memberikan suatu gambaran yang dilakukan secara jelas dan

detail tentang suatu peraturan-peraturan terhadap hukum, dan juga keputusan yang dilakukan oleh hukum.

PEMBAHASAN

Risiko dari pelanggaran data pribadi

Data pribadi merupakan suatu informasi yang terkait tentang bagaimana seorang ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap individu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Data ini mencakup berbagai jenis informasi yang bersifat pribadi dan juga sensitive, yang tidak dapat diganggu gugat. Adanya regulasi yang diterapkan ini memiliki tujuan guna melindungi serta mengawasi suatu data yang dimiliki oleh setiap individu.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan serta pengawasan pada data pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia. Adanya peraturan ini, dapat mengatur tentang bagaimana suatu data pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia ini harus di kumpulkan, dan disimpan dengan sebaik mungkin. Adanya perundang-undangan yang telah di terapkan tentang suatu perlindungan akan hak yang dimiliki oleh setiap individu, tujuannya guna mengatur tentang bagaimana data pribadi tersebut harus di kumpulkan, dan digunakan dengan sebaik mungkin.

Pentingnya perlindungan akan data pribadi pada masyarakat ialah guna melindungi hak setiap individu guna menjaga suatu informasi pribadinya dari akses yang tidak sah, dan juga guna mencegah penyalahgunaan data pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian yang finansial, dan juga agar terhindar dari pencurian data. Membangun suatu kepercayaan antara individu dan suatu organisasi yang dapat mengelola suatu data pada setiap manusia. Dengan mematuhi aturan-aturan yang telah diterapkan, membuat identitas pada manusia menjadi terjaga dan aman.

Risiko terjadinya pelanggaran hak identitas pada setiap manusia, merupakan suatu isu yang sangat penting guna mempengaruhi berbagai aspek kehidupan setiap manusia. Risiko yang terjadi, ialah :

1. Adanya pencurian identitas, yang dimana risiko ini berupa suatu informasi yang dilakukan oleh setiap manusia yang dilakukan secara tidak sah oleh orang lain, dengan tujuan guna melakukan suatu penipuan atau suatu kegiatan yang illegal. Pencurian ini, memiliki dampak yang sangat serius, ialah dengan adanya kerugian yang finansial dan juga adanya kerusakan akan reputasi.

2. Adanya diskriminasi, ialah hak akan identitas yang dimiliki oleh setiap manusia ini harus dilakukan dengan seadil mungkin. Jika identitas seseorang digunakan sebagai suatu dasar untuk suatu kejahatan, seperti kepercayaan dan lain-lain.
3. Kehilangan akan identitas yang legal, ialah di dalam berbagai situasi, individu ini memungkinkan akan kehilangan akses ke identitas hukum mereka, seperti contohnya kehilangan identitas kelahiran, dan lainnya.
4. Adanya pemalsuan akan identitas, yaitu pemalsuan akan dokumen identitas seperti adanya pemalsuan akan paspor ataupun identitas lainnya yang dapat mengakibatkan setiap masyarakat kehilangan identitasnya.
5. Penggunaan data pribadi dengan tanpa izin dari penggunanya, ialah data yang telah di kumpulkan oleh pemerintah atau perusahaan yang terkait, dapat disalahgunakan atau dibagikan tanpa adanya suatu perizinan dari pemiliknya,
6. Adanya ketidakmampuan guna mendapatkan suatu identitas, ialah ada beberapa kelompok seperti adanya pengungsian atau orang yang tinggal di daerah yang terpencil yang kekurangan akses, ini dapat mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh suatu dokumen yang resmi.

Upaya guna melindungi suatu hak terhadap suatu identitas, ialah pemerintah ini harus menerapkan suatu regulasi yang sangat kuat guna melindungi serta mengawasi akan data yang dimiliki oleh setiap manusia, ini sudah di atur di dalam suatu peraturan perundang-undnagan yang membahas tentang suatu privasi dan juga tentang suatu pengawasan akan informasi yang terkait dengan identitas pada masyarakat. Guna meningkatkan kesadaran akan masyarakat tentang pentingnya perlindungan serta pengawasan tentang suatu informasi pada data diri masyarakat.

Mitigasi risiko

Mitigasi risiko dari pelanggaran dari hak suatu identitas ini, dapat memerlukan pendekatan multi-level yang melibatkan individu, organisasi, dan pemerintah. Stratefi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi risiko, ialah :

1. Perlindungan akan data pribadi, ialah suatu pemerintah dapat memerlukan suatu penerapan dan juga penegakkan akan perundang-undangan yang memiliki tujuan guna melindungi serta mengawasi suatu data pribadi yang ketat
2. Transparasi dalam penggunaan data, ialah adanya suatu organisasi yang dilakukan oleh masyarakat secara transparan mengenai bagaimana mereka dapat mengumpulkan dan menyimpan haknya dengan sebaik mungkin

3. Menggunakan enkripsi guna melindungi serta mengawasi suatu data yang dimiliki oleh setiap pribadi
4. Menggunakan suatu perangkat secara lunak, yang memiliki tujuan guna pemantauan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau upaya akses yang tidak sah.
5. Meningkatkan kesadaran untuk masyarakat terkait dengan bagaimana pentingnya guna mengawasi suatu informasi pribadi dan cara menghindari pencurian identitas melalui kampanye informasi.
6. Memastikan bahwa proses verifikasi pada identitas setiap masyarakat ini, bersifat privat dan menggunakan metode yang ketat guna terhindar dari suatu yang dapat merugikannya.
7. Menyediakan suatu layanan bantuan untuk individu yang menjadi korban pencurian suatu identitas, termasuk bantuan hukum dan layanan pemulihan identitas.
8. Melakukan kegiatan audit keamanan berkala pada sistem yang bertujuan guna menyimpan suatu informasi yang dimiliki oleh setiap pribadi
9. Menggunakan teknologi *blockchain*, yang bertujuan untuk menciptakan suatu sistem pada identitas digital yang terdesentralisasi dan sulit untuk dipalsukan, sehingga meningkatkan keamanan identitas pribadi.

Kepatuhan terhadap perundang-undangan

Kepatuhan terhadap perundang-undangan, guna menerapkan suatu proses penegakan hukum merupakan suatu aspek yang sangat penting. Prinsip utama yang harus diperhatikan dalam kepatuhan terhadap perundang-undangan ialah :

1. Lembaga-lembaga yang terkait ini memiliki tujuan untuk suatu pelatihan serta pendidikan guna memadai tentang bagaimana suatu perundang-undangan yang telah berlaku.
2. Setiap langkah dalam proses penegakan hukum harus didokumentasikan dengan sebaik-baiknya.
3. Mengembangkan dan menerapkan SOP yang sangat jelas dan konsisten, yang bertujuan untuk semua proses penegakan hukum. SOP ini harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan secara seragam.
4. Lembaga-lembaga yang terkait ini memiliki fungsi guna mengawasi suatu eksternal dalam suatu proses penegakkan hukum serta menangani keluhan dari masyarakat.

5. Menerapkan dan menegakkan kode etik yang sangat ketat bagi semua aparat penegakkan hukum
6. Melibatkan masyarakat dalam suatu proses penegakkan hukum, ialah dilakukannya dengan melalui sebuah forum diskusi, konsultasi publik, dan mekanisme pelaporan.
7. Menggunakan sistem manajemen dengan kasus berbasis teknologi, yang bertujuan untuk melacak dan mengelola kasus-kasus hukum dengan efisien dan akurat.

KESIMPULAN

Perlindungan serta pengawasan terhadap sebuah data yang dimiliki oleh setiap manusia ini merupakan suatu proses penegakkan hukum tentang sebuah aspek yang kursial. Perlindungan data pada pribadi merupakan suatu bagian dari hak privasi yang fundamental. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang terkait ini dapat bergantung tentang bagaimana data terhadap pribadi, adanya pelanggaran akan data ini dapat merusak suatu kepercayaan.

Pemrosesan pada data diri merupakan suatu tindakan atau rangkaian tindakna yang dapat dilakukan, data ini dapat dikumpulkan langsung dari suatu individu dengan melalui pengisian akan faormulir pendaftaran. Data pribadi yang dapat mencakup informasi mengenai suatu identitas seperti nama, dan lain sebagainya. Data ini juga harus disimpan dengan sebaik mungkin, dengan menggunakan metode enkripsi atau penyimpanan ini dapat dilakukan secara lokal atau *cloud*.

Tujuan data pribadi ini ialah dilakukan untuk tujuan yang sah dan telah diinformasikan kepada pemilik data, dengan tujuan lain memerlukan suatu persetujuan guna tambahan dari pemiliknya. Adanya pemindahan data ini harus mematuhi suatu regulasi yang berlaku, seperti memastikan bahwa negara memiliki perlindungan serta pengawasan data yang setara. Adanya penghapusan data bisa saja dilakukan dengan cara digital, pemilik yang memiliki data ini harus mengakses data pribadi mereka dan meminta koreksi jika adanya kesalahan dalam mengisi suatu data.

Walaupun dalam proses data ini, dapat diperbolehkan adanya indikasi akan suatu tindakan pidana, dan juga tidak di perbolehkan karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan. Risiko yang diperoleh dari suatu pelanggaran data pribadi dalam proses penegakkan hukum dan cara mitigasi risiko tersebut, ialah :

1. Risikonya, yaitu takutnya ada penyalahgunaan pada data pribadi yang dimiliki oleh manusia. Pelanggaran ini berupa pencurian suatu identitas, penipuan, dan juga lain-lainnya
2. Kehilangan privasi, ialah suatu individu dapat mengalami kehilangan hak atas privasi yang dimiliki oleh setiap manusia, ini dapat menyebabkan rasa tidak aman dan adanya ketidakpercayaan terhadap institusi penegakkan hukum.
3. Adanya suatu pelanggaran terhadap data yang dapat menyebabkan kerugian finansial baik bagi individu yang datanya disalahgunakan
4. Adanya suatu pelanggaran dari data, ini dapat merusak suatu reputasi pada lembaga-lembaga yang terkait, dan menyebabkan ketidakpuasan pada masyarakat.
5. Adanya suatu informasi yang bocor, ini dapat digunakan untuk mengancam keamanan para individu, seperti informasi saksi atau korban kejahatan yang terekspos.

Mitigasi risiko dari kasus pelanggaran data pribadi ialah adanya implementasi regulasi yang kuat terhadap perundang-undangan yang membahas tentang suatu data pribadi, yang dapat memberikan suatu pedoman yang jelas mengenai suatu pengelolaan serta pengawasan dari data pribadi. Dengan menggunakan teknologi enkripsi, sistem keamanan yang berlapis serta protocol akses yang terbatas guna melindungi suatu data yang dimiliki oleh setiap individu yang dilakukan secara tidak sah.

Bukan hanya hal itu saja, mitigasi yang diberikannya berupa adanya suatu kegiatan berupa pelatihan serta pendidikan yang dapat memberikan pelatihan yang regular mengenai lembaga-lembaga yang terkait tentang pengawasan akan suatu data yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan melakukan suatu pengawasan yang berkala dan juga diadakannya audit yang independent ini memiliki tujuan guna memastikan bahwa prosedur suatu pengawasan data ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Menyediakan suatu mekanisme suatu pengaduan yang sangat mudah guna mengakses suatu individu dari hak nya yang telah melanggar suatu pelanggaran, serta menawarkan perlindungan yang telah memadai guna menangani suatu pelanggaran pada data. Penegakkan hukum yang dilakukan secara efektif ini berlandaskan patuh terhadap suatu perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, 2016, h. 37

Recital 50 EU GDPR “Further Processing of Personal Data”, diakses melalui <https://gdpr-info.eu/recitals/no-50/>

Perundang-undangan